

## Peran Pemerintah dan Swasta dalam Pembiayaan Pendidikan: Sebuah Analisis Komparatif

Wiwik Setiawati<sup>1\*</sup>, Eka Cahyana Adi<sup>2</sup>, Widyatmike Gede Mulawarman<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman, Indonesia

\*Email: [swiwik631@gmail.com](mailto:swiwik631@gmail.com)

---

### ARTICLE INFO

#### Article history

Received: 02-10-2025

Revised: 01-12-2025

Accepted: 31-12-2025

DOI: <https://doi.org/10.61930/jsii.v3i2>

---

#### Kata Kunci

Pembiayaan Pendidikan;  
Pemerintah Daerah;  
Sektor Swasta;  
Kemitraan Publik Swasta;  
Samarinda.

### ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji secara deskriptif komparatif peran pemerintah daerah dan sektor swasta dalam pembiayaan pendidikan di Kota Samarinda, dengan menekankan relasi antara struktur pendanaan, prioritas belanja, dan implikasinya bagi akses serta mutu layanan. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif komparatif untuk menangkap dinamika pengambilan keputusan dan praktik pembiayaan yang tidak selalu terbaca dari data anggaran semata. Data primer dihimpun melalui wawancara mendalam dengan pejabat pengelola anggaran pendidikan, pengelola sekolah negeri dan swasta, serta pengurus yayasan pendidikan, dan diperkuat oleh observasi pada satuan pendidikan terpilih. Data sekunder berupa dokumen APBD, laporan program, dan kebijakan pembiayaan digunakan untuk memverifikasi informasi dan memperkaya konteks. Analisis dilakukan melalui pengodean, kategorisasi, dan perbandingan tematik antar sektor, dengan triangulasi dan member checking untuk menjaga kredibilitas temuan. Hasil menunjukkan pemerintah tetap menjadi penyangga utama akses pendidikan melalui pembiayaan operasional sekolah negeri dan pemenuhan layanan dasar. Namun, dominasi belanja rutin mempersempit ruang fiskal untuk agenda peningkatan mutu yang menuntut investasi pengembangan, seperti pelatihan guru berkelanjutan, penguatan pembelajaran berbasis teknologi, dan inovasi kurikulum. Sementara itu, sektor swasta berkontribusi pada diversifikasi layanan, percepatan penyediaan fasilitas, serta inovasi program, termasuk pengembangan sekolah dengan layanan unggulan. Kendati demikian, tingginya biaya operasional dan ketergantungan pada pembiayaan partisipatif membatasi jangkauan layanan swasta pada kelompok ekonomi tertentu. Temuan juga menegaskan adanya ketimpangan internal kota antara pusat dan pinggiran serta belum terbangunnya kemitraan publik swasta yang sistemik. Penelitian merekomendasikan penguatan kolaborasi berbasis akuntabilitas melalui beasiswa tepat sasaran, investasi bersama fasilitas dan teknologi, serta insentif regulatif untuk memperluas layanan di wilayah kurang terlayani.

---

---

## ABSTRACT

**Keywords**  
Education financing;  
Local government;  
Private sector;  
Public private partnership;  
Samarinda.

*This study examines, through a descriptive comparative lens, the respective roles of local government and the private sector in financing education in Samarinda City, with particular attention to how funding structures and spending priorities shape access and service quality. A qualitative comparative approach was employed to capture decision making rationales and financing practices that are not fully visible in budget figures alone. Primary data were collected through indepth interviews with local education budget officials, administrators of public and private schools, and representatives of education foundations, and were complemented by field observations in selected schools. Secondary data including local budget documents (APBD), program reports, and relevant financing policies were used to verify accounts and enrich contextual interpretation. Data were analyzed through coding, categorization, and cross-sector thematic comparison, supported by triangulation and member checking to strengthen credibility. The findings indicate that the local government remains the principal guarantor of educational access by funding basic services and operational costs for public schools. However, the dominance of routine expenditure narrows the fiscal space for quality enhancing investments, such as sustained teacher professional development, technology-enabled learning, and curricular innovation. The private sector, by contrast, contributes to service diversification, faster provision of facilities, and program innovation, including the development of schools with flagship or enhanced services. Nevertheless, high operating costs and reliance on tuition based funding limit private education's reach, making access more concentrated among middle and upper income families. The study also highlights intraurban disparities between central and peripheral areas and the absence of a systematic public private financing partnership. Policy recommendations emphasize accountable collaboration through targeted scholarships, co investment in facilities and learning technologies, and regulatory incentives that encourage private provision in underserved areas. Overall, the study enriches city level scholarship on education finance and offers practical guidance toward a more inclusive and sustainable financing ecosystem.*

---

## PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan pilar utama pembangunan sumber daya manusia (SDM) karena menentukan kapasitas individu dan masyarakat dalam merespons perubahan ekonomi, sosial, dan budaya (S. Purba et al., 2022). Kualitas pendidikan, terutama pada konteks negara berkembang, sangat dipengaruhi oleh kecukupan dan efektivitas pembiayaan yang dialokasikan untuk menjamin akses dan mutu layanan (Salamun et al., 2023). Di Indonesia, pendidikan ditempatkan sebagai prioritas agenda pembangunan nasional dan pemerintah memiliki kewajiban konstitusional untuk memastikan tersedianya pendidikan bermutu bagi seluruh warga negara (Sitompul et al., 2023). Namun, peningkatan kebutuhan layanan dan keterbatasan fiskal membuat pembiayaan menjadi isu struktural yang terus berulang di berbagai daerah (Ramadhani et al., 2022). Situasi ini mendorong perlunya strategi pembiayaan yang tidak hanya bergantung pada APBN/APBD, tetapi juga melibatkan aktor non negara secara terukur dan akuntabel.

Pada era globalisasi dan percepatan teknologi yang sering dikaitkan dengan revolusi industri 4.0, tuntutan peningkatan mutu pendidikan semakin kompleks dan menuntut investasi yang lebih beragam (Subakti et al., 2024). Kebutuhan pembiayaan tidak lagi terbatas pada pembangunan fisik, tetapi juga mencakup penguatan kurikulum, peningkatan kapasitas guru, pengadaan teknologi pembelajaran, serta inovasi pedagogis (Hasibuan et al., 2022). Dalam konteks ini, sektor swasta dapat berperan sebagai mitra strategis pemerintah untuk memperluas ragam layanan, mempercepat inovasi, dan meningkatkan akses masyarakat terhadap fasilitas pendidikan (Sartika et al., 2022). Peran swasta juga tampak melalui pendirian satuan pendidikan dan dukungan pendanaan yang relatif fleksibel dalam merespons kebutuhan lokal (Efendi et al., 2022). Meski demikian, keterlibatan swasta menuntut pengaturan yang jelas agar sinergi publik swasta tetap berpihak pada kepentingan publik, bukan semata pada logika pasar (Utami et al., 2022).

Secara normatif, pembiayaan pendidikan merupakan tanggung jawab negara, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 31 Ayat 4 UUD 1945 yang mewajibkan alokasi anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN. Ketentuan tersebut menunjukkan komitmen negara terhadap pemerataan layanan pendidikan dan penguatan kualitas pendidikan sebagai layanan publik esensial (A. Purba et al., 2022). Akan tetapi, besarnya alokasi tidak selalu berbanding lurus dengan pemenuhan kebutuhan pendidikan karena struktur belanja cenderung didominasi pos rutin, seperti gaji dan operasional, sehingga ruang untuk inovasi sering terbatas (S. Purba et al., 2023). Selain itu, efektivitas pembiayaan juga dipengaruhi kapasitas tata kelola dan kemampuan daerah dalam mengelola anggaran pendidikan (R. A. Purba et al., 2024). Dengan demikian, persoalan pembiayaan tidak semata “jumlah anggaran”, melainkan juga desain alokasi, ketepatan belanja, serta akuntabilitas pengelolaan.

Kesenjangan pembiayaan pendidikan semakin nyata ketika dikaitkan dengan disparitas antardaerah, baik dari sisi kapasitas fiskal maupun akses terhadap sumber daya pendidikan (Syam et al., 2022). Daerah yang memiliki kemampuan anggaran lebih kuat cenderung mampu mempercepat perbaikan sarana, layanan, dan program peningkatan mutu, sedangkan daerah dengan kapasitas lemah menghadapi keterbatasan dalam pemenuhan standar layanan (Damiati et al., 2024). Di banyak kasus, belanja pendidikan lebih banyak terserap pada infrastruktur dan belanja pegawai, sementara investasi pada inovasi pembelajaran, teknologi, dan pengembangan kapasitas tenaga pendidik kurang memperoleh porsi memadai (Mukmin et al., 2024). Kondisi ini berpotensi memperlebar ketimpangan mutu antarsekolah dan antarkawasan (Prihatmojo et al., 2022). Oleh karena itu, partisipasi sektor swasta dipandang penting untuk menutup sebagian gap pembiayaan, terutama pada aspek yang memerlukan fleksibilitas dan percepatan inovasi (Mariani & Husnial Pardi, 2023). Namun, partisipasi tersebut perlu dibingkai dalam tata kelola yang adil agar tidak menimbulkan eksklusivitas akses dan komersialisasi layanan (Mariani & Husnial Pardi, 2023).

Secara akademik, penelitian tentang pembiayaan pendidikan telah banyak dilakukan, tetapi sebagian besar masih berfokus pada level makro seperti kebijakan nasional, tren belanja pendidikan, atau studi pemerataan secara agregat. Sementara itu, dinamika lokal yang memperlihatkan interaksi langsung antara pemerintah daerah dan sektor swasta dalam pembiayaan pendidikan relatif kurang ditelaah

secara komparatif (Wahyudin, 2021). Padahal, konteks lokal sering menentukan bagaimana kebijakan pembiayaan diterjemahkan ke dalam praktik, termasuk strategi prioritas belanja, mekanisme kolaborasi, dan bentuk akuntabilitas (Papilaya, 2022). Selain itu, konteks perkotaan memiliki karakter khas karena adanya variasi kemampuan ekonomi masyarakat, kompetisi penyedia layanan, dan tuntutan mutu yang lebih tinggi. Kekosongan kajian pada level lokal membuat pemahaman tentang efektivitas peran publik swasta dalam pembiayaan pendidikan menjadi belum utuh (Aflaha et al., 2021). Dengan demikian, studi komparatif yang menguji kontribusi pemerintah dan swasta pada tingkat daerah menjadi relevan untuk memperkaya literatur sekaligus memberi masukan kebijakan (Aflaha et al., 2021).

Kota Samarinda dipilih sebagai lokasi penelitian karena posisinya sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Timur yang mengalami dinamika pertumbuhan penduduk, mobilitas sosial, dan kebutuhan layanan pendidikan yang terus meningkat. Kehadiran lembaga pendidikan swasta di Samarinda membuka peluang diversifikasi layanan dan perluasan akses, terutama pada jenjang pendidikan dasar. Pada saat yang sama, pemerintah daerah tetap menjadi aktor utama dalam penyediaan layanan pendidikan melalui kebijakan, program, dan alokasi anggaran, meskipun menghadapi keterbatasan fiskal yang mendorong perlunya kolaborasi (Syam et al., 2022). Kondisi ini menghadirkan ruang penelitian yang penting untuk menilai bagaimana peran kedua sektor berinteraksi dalam mendanai pendidikan (Subakti et al., 2025). Samarinda juga merepresentasikan konteks perkotaan yang heterogen sehingga memungkinkan analisis lebih tajam terkait variasi akses, mutu, dan preferensi masyarakat. Oleh sebab itu, studi kasus Samarinda relevan untuk menggambarkan tantangan dan peluang pembiayaan pendidikan pada level kota.

Penelitian ini bertujuan menganalisis secara komparatif peran pemerintah dan sektor swasta dalam pembiayaan pendidikan di Kota Samarinda, termasuk bentuk kontribusi, prioritas pendanaan, dan implikasinya terhadap mutu serta akses layanan pendidikan. Penelitian juga mengidentifikasi tantangan yang muncul dalam kolaborasi publik swasta, seperti koordinasi kebijakan, kesenjangan tujuan, dan mekanisme pengawasan (Asiah, 2023). Celah penelitian yang hendak diisi adalah minimnya kajian komparatif yang secara spesifik menelaah pembiayaan pendidikan pada konteks lokal perkotaan dengan melibatkan aktor publik dan swasta sebagai unit analisis utama (Suhelayanti et al., 2023). Selain itu, studi ini berupaya menangkap dinamika yang tidak selalu tercermin dalam data anggaran, seperti alasan keputusan belanja, pertimbangan kualitas, dan strategi adaptasi lembaga. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana pembiayaan pendidikan bekerja di tingkat kota.

Kebaruan penelitian terletak pada penggunaan pendekatan komparatif publik swasta berbasis konteks lokal Samarinda dengan penguatan data primer dari pemangku kepentingan pendidikan. Pendekatan ini memungkinkan analisis tidak hanya pada besaran kontribusi, tetapi juga pada mekanisme pembiayaan, pola tata kelola, serta faktor yang memengaruhi efektivitas pendanaan (Abi Hamid et al., 2024). Temuan penelitian diharapkan memberikan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat sinergi pemerintah dan swasta dalam pembiayaan pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan. Hal ini penting karena perkembangan peran swasta

perlu diimbangi regulasi dan pengawasan yang memastikan layanan pendidikan tetap mengutamakan mutu dan akses bagi seluruh kelompok Masyarakat. Dengan mendorong kolaborasi yang akuntabel dan berorientasi kepentingan publik, penelitian ini diharapkan berkontribusi pada perumusan kebijakan pembiayaan pendidikan yang lebih adil, efektif, dan adaptif di Kota Samarinda serta dapat menjadi pembelajaran bagi daerah lain.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif komparatif dengan desain kualitatif untuk menganalisis peran pemerintah dan sektor swasta dalam pembiayaan pendidikan di Kota Samarinda. Fokus kajian diarahkan pada perbandingan kontribusi pembiayaan, kebijakan yang diterapkan, serta implikasinya terhadap akses dan kualitas layanan pendidikan, sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai dinamika pembiayaan di tingkat lokal (Sudarmanto et al., 2022). Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan eksplorasi mendalam atas proses, rasionalitas pengambilan keputusan, serta bentuk interaksi antarpelaku pembiayaan yang tidak selalu tercermin dalam data angka (Salehudin et al., 2023). Dengan demikian, rancangan metodologis ini ditujukan untuk menghasilkan temuan yang relevan bagi penyusunan rekomendasi kebijakan pembiayaan pendidikan yang lebih efektif dan kontekstual.

Lokasi penelitian ditetapkan di Kota Samarinda, Kalimantan Timur, dengan pertimbangan sebagai ibu kota provinsi yang memiliki karakteristik sosial ekonomi yang beragam dan tingkat partisipasi sektor swasta yang relatif tinggi dalam penyediaan layanan pendidikan. Konteks Samarinda juga menghadirkan isu pemerataan akses dan kualitas pendidikan, sehingga menjadi arena yang memadai untuk menelaah relasi pembiayaan antara aktor publik dan swasta. Data utama penelitian bersumber dari wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan, meliputi pejabat pemerintah daerah yang menangani anggaran pendidikan, pengelola lembaga pendidikan negeri dan swasta, serta pihak lain yang berperan dalam perencanaan dan pengelolaan pendanaan (Pakpahan et al., 2022). Untuk memperkuat deskripsi konteks, penelitian juga menggunakan data sekunder berupa dokumen anggaran pendidikan pemerintah daerah, laporan keuangan lembaga pendidikan swasta, dan dokumen kebijakan pendidikan yang berlaku (Syam et al., 2024).

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik yang saling melengkapi, yakni wawancara mendalam, studi dokumentasi, dan observasi lapangan (Nurhasanah et al., 2021). Wawancara dilakukan menggunakan pedoman semi terstruktur agar data yang diperoleh terarah namun tetap memberi ruang bagi informan menjelaskan pengalaman, praktik, dan pertimbangan mereka secara rinci (Mukmin et al., 2024). Studi dokumentasi digunakan untuk memeriksa konsistensi informasi dan memetakan struktur alokasi pembiayaan, prioritas belanja, serta ketentuan kebijakan yang menjadi rujukan dalam praktik (Labuem et al., 2025). Observasi lapangan dilakukan untuk menangkap gambaran faktual mengenai bentuk interaksi pemerintah swasta dalam pendanaan dan pengelolaan pendidikan, termasuk pola koordinasi dan implementasi program (Kholifah et al., 2024). Kombinasi tiga teknik ini diharapkan memperkaya data, memperkuat argumentasi, dan meningkatkan ketepatan interpretasi temuan (Jaedun et al., 2024).

Analisis data dilakukan dengan analisis komparatif melalui tahapan pengodean, kategorisasi, dan perbandingan tematik antar sektor (Clara Vidhia, 2022). Data hasil wawancara, dokumen, dan observasi disusun ke dalam tema-tema kunci seperti bentuk kontribusi finansial, mekanisme pendanaan, kebijakan penganggaran, strategi peningkatan mutu, serta hambatan dan peluang kolaborasi (Net et al., 2024). Validitas dan reliabilitas temuan dijaga melalui triangulasi sumber dan teknik, yaitu membandingkan hasil wawancara dengan dokumen dan temuan observasi (Salehudin et al., 2024). Selain itu, penelitian menerapkan member checking dengan mengonfirmasi ringkasan hasil wawancara kepada informan untuk memastikan akurasi dan mengurangi bias interpretasi (Widyastuti et al., 2022). Dengan prosedur tersebut, hasil penelitian diharapkan memiliki keterlacakan (audit trail) dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar rekomendasi kebijakan pembiayaan pendidikan di Kota Samarinda (Siregar et al., 2024).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan pendidikan di Kota Samarinda ditopang oleh dua aktor utama, yakni pemerintah daerah dan sektor swasta, dengan pola kontribusi dan orientasi yang berbeda. Pemerintah berperan sebagai penyedia layanan publik utama melalui mekanisme anggaran daerah, sementara swasta memperluas ragam layanan melalui penyelenggaraan satuan pendidikan dan inovasi program. Temuan lapangan (berdasarkan wawancara dan telaah dokumen) mengindikasikan bahwa relasi kedua aktor ini belum sepenuhnya terintegrasi dalam skema kolaborasi yang sistemik, sehingga kontribusi sering berjalan paralel. Pada sisi akses, pemerintah cenderung menjadi tumpuan kelompok masyarakat luas, sedangkan swasta lebih dominan pada segmen yang mampu membayar. Konteks ini menegaskan bahwa isu pembiayaan di Samarinda bukan hanya persoalan “besar dana”, tetapi juga soal pemerataan, mutu, dan tata kelola kemitraan.

Dari sisi pemerintah, informan menyatakan bahwa alokasi anggaran pendidikan pada prinsipnya mengikuti mandat konstitusional minimal 20% dari APBD, namun ruang fiskal untuk pembiayaan peningkatan mutu masih relatif terbatas karena komposisi belanja yang dominan bersifat rutin. Mandat alokasi minimal 20% sebagai kebijakan nasional juga banyak dirujuk dalam berbagai sumber kebijakan dan praktik penganggaran daerah. Meskipun porsi anggaran terlihat besar, temuan wawancara menegaskan bahwa pemerintah menghadapi tekanan kebutuhan yang meningkat, terutama untuk pembaruan fasilitas, pemeliharaan, dan penyesuaian layanan pendidikan terhadap tuntutan zaman. Pada titik ini, efektivitas belanja menjadi isu kunci karena besaran alokasi tidak otomatis berbanding lurus dengan peningkatan kualitas. Dengan demikian, peran pemerintah kuat pada jaminan akses dasar, tetapi menghadapi tantangan pada akselerasi mutu dan inovasi.

Pembahasan lebih lanjut menunjukkan bahwa belanja pemerintah daerah cenderung berorientasi pada pembiayaan operasional sekolah negeri, termasuk gaji pendidik/tenaga kependidikan serta pemenuhan sarana dasar. Pola ini memperlihatkan trade-off kebijakan: ketika belanja rutin mendominasi, pembiayaan untuk penguatan pembelajaran misalnya pengembangan kurikulum

berbasis teknologi dan pelatihan guru menjadi lebih sulit diperluas. Temuan wawancara mengonfirmasi adanya kebutuhan peningkatan kapasitas guru dan pembelajaran berbasis teknologi yang belum sepenuhnya tertangani karena keterbatasan ruang belanja pengembangan. Dalam perspektif tata kelola, kondisi tersebut dapat memunculkan “crowding-out effect” terhadap agenda inovasi karena anggaran terserap pada kebutuhan yang tidak mudah dikurangi. Karena itu, tantangan pemerintah tidak hanya soal menambah dana, tetapi juga menata ulang prioritas belanja agar lebih responsif terhadap peningkatan mutu.

Sementara itu, sektor swasta di Kota Samarinda berkontribusi melalui penyediaan fasilitas dan layanan pendidikan yang relatif beragam, terutama pada pendidikan dasar (PAUD, SD, SMP). Berdasarkan wawancara pengelola lembaga pendidikan swasta, pembiayaan sekolah tidak hanya mengandalkan SPP, tetapi juga memanfaatkan skema lain seperti dukungan yayasan, kemitraan, dan penguatan layanan berbasis program. Pada level praktik, swasta cenderung lebih luwes dalam merancang program unggulan, mengadopsi inovasi layanan, dan mempercepat pengadaan fasilitas sesuai kebutuhan lembaga. Fleksibilitas ini menjelaskan mengapa sekolah swasta sering dipersepsikan menawarkan diferensiasi mutu dan layanan yang lebih cepat beradaptasi. Namun, ketergantungan pada pembiayaan partisipatif juga membuat daya jangkau layanan swasta sangat dipengaruhi kemampuan ekonomi keluarga.

Temuan juga menunjukkan bahwa sebagian lembaga swasta mengembangkan sekolah dengan orientasi kurikulum yang lebih “global” atau berstandar internasional, sehingga menyediakan pilihan bagi orang tua yang mencari layanan pendidikan diferensiatif. Di Samarinda, keberadaan sekolah terpadu berstandar internasional juga menjadi isu penting dalam diskursus mutu, karena pemerintah kota meresmikan Sekolah Terpadu Samarinda di Jalan Jakarta, Loa Bakung, dan peresmian tersebut dihadiri Mendikdasmen Abdul Mu’ti. Kehadiran satuan pendidikan semacam ini memperkuat kompetisi mutu sekaligus memperluas spektrum pilihan layanan pendidikan di perkotaan. Namun, secara umum, layanan swasta tetap menghadapi kendala biaya operasional yang tinggi sehingga aksesnya lebih banyak dinikmati kelompok menengah ke atas. Kondisi ini menguatkan temuan bahwa kontribusi swasta signifikan pada inovasi dan pilihan layanan, tetapi masih menyisakan problem pemerataan akses.

Komparasi antara pemerintah dan swasta memperlihatkan perbedaan yang tegas pada skala pendanaan, fleksibilitas, dan orientasi layanan. Pemerintah unggul dalam cakupan layanan dan mandat pemerataan, tetapi sering terkendala pada fleksibilitas inovasi serta kecepatan penguatan mutu karena struktur belanja yang cenderung rigid. Sebaliknya, swasta memiliki kelincahan inovasi dan kemampuan merancang layanan unggulan, tetapi menghadapi batasan akses karena biaya serta ketergantungan pada pembiayaan partisipatif. Perbedaan ini menghasilkan situasi paradoks: kedua sektor sama-sama berkontribusi pada peningkatan mutu, tetapi masing-masing menasar segmen yang berbeda sehingga “mutu” dan “akses” tidak selalu bergerak seiring. Dengan demikian, problem pembiayaan pendidikan di Samarinda lebih tepat dibaca sebagai persoalan desain ekosistem pembiayaan, bukan sekadar penambahan sumber dana.

Pada aspek tantangan, temuan mengindikasikan adanya ketimpangan internal kota, terutama antara wilayah pusat dan pinggiran dalam hal ketersediaan fasilitas,

distribusi sumber daya, serta kualitas layanan pendidikan. Ketimpangan ini berpotensi menguat ketika inovasi dan layanan unggulan terkonsentrasi pada area tertentu, sementara wilayah pinggiran menghadapi keterbatasan sarana dan dukungan. Dalam konteks ini, pembangunan Sekolah Terpadu Samarinda dapat dibaca sebagai upaya pemerintah mendorong tolok ukur mutu dan fasilitas modern, termasuk integrasi jenjang pendidikan dalam satu kawasan. Namun, keberadaan sekolah unggulan tidak otomatis menyelesaikan isu pemerataan bila tidak diikuti strategi distribusi kualitas, afirmasi akses, serta penguatan sekolah pada wilayah yang lebih rentan. Oleh sebab itu, pembahasan menegaskan pentingnya kebijakan yang menyeimbangkan “pusat pertumbuhan mutu” dengan “pemerataan mutu” lintas kecamatan.

Berdasarkan keseluruhan temuan, potensi kolaborasi pemerintah swasta di Samarinda terbuka lebar, tetapi memerlukan desain kemitraan yang jelas agar tidak memperlebar kesenjangan akses. Kolaborasi dapat diarahkan pada program beasiswa yang tepat sasaran, dukungan pembelajaran berbasis teknologi, peningkatan kompetensi guru, serta penyediaan fasilitas pendidikan di wilayah yang kurang berkembang. Pemerintah dapat berperan pada regulasi, afirmasi pemerataan, dan insentif investasi pendidikan yang berorientasi layanan publik, sementara swasta dapat menyumbang inovasi, efisiensi pengadaan, dan mobilisasi sumber daya. Namun, kolaborasi perlu dilengkapi mekanisme akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan mutu agar orientasi layanan tidak bergeser semata pada keuntungan. Dengan demikian, sinergi publik swasta yang dirancang secara adil dan terukur berpotensi menjadi strategi kunci untuk membangun pembiayaan pendidikan yang lebih inklusif dan berkelanjutan di Kota Samarinda.

## **SIMPULAN**

Pembiayaan pendidikan di Kota Samarinda ditopang oleh dua aktor utama pemerintah daerah dan sektor swasta yang berkontribusi dengan logika, instrumen, dan sasaran layanan yang berbeda. Pemerintah berperan dominan dalam menjamin akses pendidikan bagi masyarakat luas melalui pembiayaan sekolah negeri dan pemenuhan layanan dasar, sedangkan sektor swasta memperluas pilihan layanan melalui pengembangan sekolah dan program yang lebih luwes serta responsif terhadap kebutuhan pengguna. Pola kontribusi ini menunjukkan bahwa ekosistem pembiayaan di Samarinda belum sepenuhnya terintegrasi, karena kedua sektor cenderung berjalan paralel. Akibatnya, capaian akses dan mutu tidak selalu bergerak seiring di semua wilayah dan kelompok sosial.

Dari sisi pemerintah, temuan menegaskan bahwa meskipun alokasi anggaran pendidikan mengacu pada ketentuan minimal 20% APBD, struktur belanja yang didominasi kebutuhan rutin terutama operasional dan belanja pegawai membatasi ruang untuk akselerasi mutu. Konsekuensinya, agenda peningkatan kualitas yang menuntut investasi pengembangan (pelatihan guru, pembelajaran berbasis teknologi, pembaruan metode dan perangkat ajar) sering tidak berkembang secepat kebutuhan. Dengan kata lain, tantangan utama pemerintah bukan hanya pada besaran dana, tetapi pada efektivitas prioritas belanja dan kemampuan mendorong inovasi secara merata.

Pada sisi swasta, kontribusi signifikan tampak pada inovasi layanan, diversifikasi kurikulum, serta percepatan penyediaan fasilitas yang lebih modern.

Namun, ketergantungan pada pembiayaan partisipatif dan tingginya biaya operasional membuat akses pendidikan swasta lebih banyak dinikmati kelompok menengah ke atas. Situasi ini memperkuat kesenjangan akses terhadap layanan bermutu, terutama bila sekolah-sekolah unggulan terkonsentrasi di area tertentu dan tidak diimbangi strategi afirmasi bagi kelompok rentan. Dengan demikian, peran swasta kuat pada diferensiasi mutu, tetapi lemah pada jangkauan pemerataan tanpa dukungan kebijakan dan skema pembiayaan yang inklusif.

Secara keseluruhan, tantangan pembiayaan pendidikan di Samarinda paling menonjol pada ketimpangan distribusi sumber daya dan kualitas layanan antara wilayah pusat dan pinggiran, serta belum optimalnya kolaborasi publik swasta. Karena itu, solusi yang paling prospektif adalah membangun kemitraan yang lebih sistemik melalui program beasiswa tepat sasaran, dukungan teknologi pembelajaran, peningkatan kapasitas guru, dan investasi fasilitas di wilayah kurang berkembang, disertai mekanisme akuntabilitas dan pengawasan mutu yang tegas. Pemerintah perlu memperkuat regulasi, insentif, dan desain afirmasi, sedangkan swasta dapat memperluas kontribusi pada inovasi dan mobilisasi sumber daya. Jika sinergi ini berjalan dengan prinsip keadilan akses dan transparansi, pembiayaan pendidikan di Samarinda berpotensi menjadi lebih inklusif, efektif, dan berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abi Hamid, M., Subakti, H., Sari, A. C., Jumarlis, M., Suleman, N., Mansyur, M. Z., Nurlely, L., Rabiula, A., Rela, I. Z., & Nasbey, H. (2024). *Media Pembelajaran Di Era Digital: Perkembangan, Konsep, dan Fungsi*. Yayasan Kita Menulis.
- Aflaha, A., Purbaya, D., Juheri, D., & Barlian, U. C. (2021). Analisis standar pembiayaan pendidikan. *MASILE*, 2(1), 24–59.
- Asiah, D. (2023). Tanggung Jawab Pemerintah, Pihak Swasta, dan Masyarakat dalam Pembiayaan Pendidikan. *Jurnal Pelita Nusantara*, 1(1), 68–75.
- Clara Vidhia. (2022). Manajemen Peningkatan Kinerja Guru untuk Menghasilkan Pembelajaran yang Bermutu pada Sekolah Menengah Kejuruan di Jakarta. *Jurnal Pendidikan Mipa*, 12(4), 1045–1057. <https://doi.org/10.37630/jpm.v12i4.741>
- Damiati, M., Junaedi, N., & Asbari, M. (2024). Prinsip Pembelajaran dalam Kurikulum Merdeka. *Journal of Information Systems and Management (JISMA)*, 3(2), 11–16.
- Efendi, M. Y., Salamun, S., Mahatmaharti, R. A. K., Arvianti, A., Suhartati, T., Subakti, H., Sari, A. C., Panjaitan, M. M. J., Sunawi, S., & Purwaningtyas, A. (2022). *Asas-Asas Pendidikan: Konsep dan Teori*. Yayasan Kita Menulis.
- Hasibuan, F. A., Subakti, H., Harizahayu, H., Salamun, S., Siallagan, T., Saftari, M., Ritonga, M. W., Suhartati, T., Purba, B., & Nasution, Y. A. (2022). *Pengembangan Media dan Teknologi Pembelajaran*. Yayasan Kita Menulis.
- Jaedun, A., Nurtanto, M., Mutohhari, F., Saputro, I. N., & Kholifah, N. (2024). Perceptions of vocational school students and teachers on the development of

interpersonal skills towards Industry 5.0. *Cogent Education*, 11(1).  
<https://doi.org/10.1080/2331186X.2024.2375184>

Kholifah, N., Nurtanto, M., Mutohhari, F., Subakti, H., Ramadhan, M. A., & Majid, N. W. A. (2024). The mediating role of motivation and professional development in determining teacher performance in vocational schools. *Cogent Education*, 11(1). <https://doi.org/10.1080/2331186X.2024.2421094>

Labuem, S., Rahmawati, I., Marshanawiah, A., Muhammadun, M., Ansya, Y. A., Tangka, G. M. W., Firdian, F., Amiruddin, A., Surawan, G. C., & Subakti, H. (2025). *Statistik Pendidikan: Teori dan Aplikasi*. Yayasan Kita Menulis.

Mariani, R., & Husnial Pardi, H. (2023). Strategi Kepala Madrasah Dalam Mengelola Konflik Di Madrasah Aliyah Negeri. *Jurnal Manajemen Dan Budaya*, 3(2), 20–31. <https://doi.org/10.51700/manajemen.v3i2.449>

Mukmin, M., Subakti, H., Sulaiman, S., Zainuri, H., Saputro, A. N. C., Sihalo, M., Awal, R., Labuem, S., Yusuf, B., & Kholifah, N. (2024). *Inovasi Pembelajaran di Abad 21*. Yayasan Kita Menulis.

Net, W. W. W. P., Marganingsih, A., Pelipa, E. D., Seran, E. Y., Tuah, A. E., Kholifah, N., & Subakti, H. (2024). Determining Green Entrepreneurial Innovation of Higher Education Students: SEM Analysis Approach. *Pegem Journal of Education and Instruction*, 14(2), 158–166. <https://doi.org/10.47750/pegegog.14.02.20>

Nurhasanah, N., Hayatuddin, A., & Hidayat, Y. R. (2021). *Metodologi Studi Islam*. Amzah.

Pakpahan, M., Amruddin, A., Sihombing, R. M., Siagian, V., Kuswandi, S., Arifin, R., Mukhoirotn, M., Karwanto, K., Tasrim, I. W., & Kato, I. (2022). *Metodologi Penelitian*. Yayasan Kita Menulis.

Papilaya, J. (2022). *Manajemen Pembiayaan Pendidikan*. Cv. Azka Pustaka.

Prihatmojo, A., Subakti, H., Purba, P. B., Yurfiah, Y., Soesana, A., Thahura, F., Panjaitan, M. M. J., Saputro, A. N. C., Suesilowati, S., & Al Haddar, G. (2022). *Pengantar Landasan Pendidikan*. Yayasan Kita Menulis.

Purba, A., Widyastuti, A., Soesana, A., Salamun, S., Suesilowati, S., Lestari, R., Purba, S., Soputra, D., Subakti, H., & Fauzi, A. (2022). *strategi pembelajaran (suatu Pengantar)*. Yayasan Kita Menulis.

Purba, R. A., Baharuddin, M. R., Andre, H., Ritnawati, R., Nopindra, A., Subakti, H., Bahtiar, A. Z., Pandia, M., Ilham, M., & Nur, M. N. A. (2024). *Teknologi Informasi dalam Pendidikan Teknologi Kejuruan: Konsep dan Aplikasi*. Yayasan Kita Menulis.

Purba, S., Subakti, H., Hasan, M., Handican, R., Pratiwi, I. I., Sari, M., Simanjuntak, M., Pohan, M. M., Arhesa, S., & Yustita, A. D. (2023). *Politik dan Pemasaran Pendidikan*. Yayasan Kita Menulis.

Purba, S., Subakti, H., Kato, I., Astari, W., Sari, R. N., Sari, A. C., Mawati, A. T., Anzelina, D., Salamun, S., & Pramana, C. (2022). *Konsep Manajemen dalam Pendidikan*. Yayasan Kita Menulis.

- Ramadhani, Y. R., Subakti, H., Masri, S., Brata, D. P. N., Salamun, S., Walukow, D. S., Haeruman, L. D., Sianipar, L. K., Sanjaya, L. A., & Fidhyallah, N. F. (2022). *Pengantar strategi pembelajaran*. Yayasan Kita Menulis.
- Salamun, S., Subakti, H., Simarmata, N. I. P., Purwanti, E., Pratiwi, I. I., Pohan, M. M., Anwar, K., Zebua, A. M., Kunusa, W. R., & Tasrim, I. W. (2023). *Manajemen Sumber Daya Manusia Bidang Pendidikan*. Yayasan Kita Menulis.
- Salehudin, M., Suparmi, S., Nurdaniati, N., Panggih, P., & Subakti, H. (2024). Pendampingan Kepemimpinan Kepala Sekolah Sebagai Pemimpin Pembelajaran Pada Program Sekolah Penggerak Kota Bontang. *As-Sidanah : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(1), 17–33. <https://doi.org/10.35316/assidanah.v6i1.17-33>
- Salehudin, M., Zurqoni, Z., Robingatin, R., Syobah, S. N., Janah, F., Rorimpandey, W. H. F., & Subakti, H. (2023). Mobile Learning With Discord Application as Creative Teaching. *TEM Journal*, 12(3), 1697–1705. <https://doi.org/10.18421/TEM123-51>
- Sartika, S. H., Subakti, H., Salamun, S., Chamidah, D., Firdian, F., Nirbita, B. N., Kuswandi, S., Arianti, I., Simarmata, J., & Mansyur, M. Z. (2022). *Teknologi dan Media dalam Pembelajaran*. Yayasan Kita Menulis.
- Siregar, R. S., Hutagaol, K., Sahir, S. H., Subakti, H., Tauran, S. F., Simanjuntak, D., Astari, W., Sari, P., & Lotulung, C. V. (2024). *Aplikasi SPSS dalam Statistik Pendidikan*. Yayasan Kita Menulis.
- Sitompul, R. S., Widyastuti, A., Pohan, M. M., Sari, M., Sari, I. N., Subakti, H., Salamun, S., Mulyani, S., Astuti, Y., & Astari, W. (2023). *Manajemen Pendidikan*. Yayasan Kita Menulis.
- Subakti, H., Betaubun, M., Syawaluddin, A., Bariah, S., Meisarah, F., Heryanti, E., & Simarmata, J. (2024). *Pendidikan 4.0: Menghadapi Tantangan dan Peluang Era Digital*. Yayasan Kita Menulis.
- Subakti, H., Nurtanto, M., Butsiarah, B., Saputro, A. N. C., Adila, A. S. D., Chamidah, D., Patria, I., Mutmainnah, M., Asrul, B. E. W., & Marito, W. (2025). *Sekolah Masa Depan: Mengintegrasikan AI dan Pembelajaran Interaktif*. Yayasan Kita Menulis.
- Sudarmanto, E., Yenni, Y., Rahmawati, I., Hana, K. F., Prasetio, A., Umara, A. F., Susiati, A., Hardono, J., Harizahayu, H., & Harianja, J. K. (2022). *Metode Riset Kuantitatif dan Kualitatif*. yayasan kita menulis.
- Suhelayanti, S., Al Haddar, G., Yurfiah, Y., Purwanti, E., Sari, M., Syamsiah, Z., Subakti, H., Juliana, J., Munthe, A. P., & Sastri, L. (2023). *Penilaian Pembelajaran MI/SD*. Yayasan Kita Menulis.
- Syam, S., Marbun, T., Nasbey, H., Saputro, A. N. C., Simarmata, J., Sumanik, N. B., Suleman, N., Subakti, H., & Zainuri, H. (2024). *Transformasi Kurikulum: Menyongsong Era Pendidikan Baru di Indonesia*. Yayasan Kita Menulis.
- Syam, S., Subakti, H., Kristianto, S., Chamidah, D., Suhartati, T., Haruna, N. H., Harianja, J. K., Sitopu, J. W., Yurfiah, Y., & Purba, S. (2022). *Belajar dan*

*pembelajaran*. Yayasan kita menulis.

Utami, N. R., Subakti, H., Salamun, S., Suesilowati, S., Simarmata, J., Kuswandi, S., Ferwati, W., Arvianti, A., Fahmi, A. I., & Mahatmaharti, A. K. (2022). *Pengantar Dasar Ilmu Pendidikan*. Yayasan Kita Menulis.

Wahyudin, U. R. (2021). *Manajemen Pembiayaan Pendidikan (Pendekatan Prinsip Efisiensi, Efektivitas, Transparansi Dan Akuntabilitas)*. Deepublish.

Widyastuti, A., Subakti, H., Gaol, R. L., Sinaga, R., Sari, H., Al Haddar, G., Yurfiah, Y., Saputro, A. N. C., Wibowo, F. C., & Susanti, D. (2022). *Media dan sumber belajar*. Yayasan kita menulis.